

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Alat Bukti Saksi Dalam Pembuktian *Cybercrime* Di Persidangan Berdasarkan Perpektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Elektronik Dan Transaksi Elektronik

Cyber crime merupakan tindak pidana yang dapat dikatakan baru dan memerlukan pembahasan serta penindakan yang serius dikarenakan tindak pidana *Cyber crime* daya jangkauan dan dampaknya bisa sangat luas karena dengan kemajuan teknologi dapat menembus batas ruang dan waktu. *Cyber crime* memang benar nyata dan berbeda dari metode kejahatan tradisional sehingga membutuhkan artikulasi hukum baru dan pembentukan teknik investigasi yang baru. Akan tetapi jika mengasumsikan bahwa perbuatan *cybercrime* bukanlah fenomena baru melainkan tidak lebih dari pelaku yang menggunakan sistem elektronik untuk melakukan sesuatu yang melanggar hukum, dan suatu sistem elektronik hanyalah media yang digunakan untuk melakukan kejahatan tradisional, maka tidak perlu ada kategori khusus untuk *cybercrime* dan membuat peraturan baru untuk mengatasinya; hukum yang sudah ada seharusnya cukup untuk melakukannya. Sebab sesungguhnya aktivitas di internet dan akibat hukumnya tidak bisa dilepaskan dari manusia yang ada di dunia nyata, sehingga aturan hukum tradisional seharusnya dapat pula digunakan untuk mengatur aktivitas tersebut.⁶⁰

Sejatinya dalam perkara tindak pidana *Cybercrime* pada proses pembuktian alat bukti dipersidangan tidak jauh berbeda dengan proses

⁶⁰ Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara, Perkembangan Kajian Cyber crime di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

pembuktian tindak pidana umum, seperti yang kita ketahui bahwa alat bukti yang di gunakan atau di sahkan/perbolehkan yakni antara lain yang disebutkan didalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Berdasarkan KUHAP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam tindak pidana *cyber crime* alat bukti yang dapat dipergunakan adalah sebagai berikut :

1. Keterangan Saksi

Berdasarkan Pasal 1 angka 26 KUHAP dinyatakan “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri”.⁶¹ Sementara itu Keterangan Saksi menurut Pasal 1 angka 27 KUHAP, “Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”.⁶²

Sedangkan saksi dalam perkara *Cyber crime* melibatkan orang yang melihat dan menguasai dunia maya yang keterangannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam mengungkap fakta di persidangan, hal ini diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,⁶³ yang berbunyi “Setiap orang yang menyatakan hak, memperkuat hak yang telah ada, atau menolak hak orang lain berdasarkan adanya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik

⁶¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 1 Angka 26.

⁶² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 1 Angka 27.

⁶³ Eddy O.S. Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012, hal. 103.

harus memastikan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ada padanya berasal dari sistem Elektronik yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan....”⁶⁴

Pada Pasal 44 menyebutkan “Alat bukti penyidikan penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan menurut ketentuan undang-undang ini adalah sebagai berikut : a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan, dan b. alat bukti berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).”⁶⁵

Dalam prosedur pemberian keterangan saksi di pengadilan dapat melalui teleconference dengan menunjuk pada Pasal 1 angka 1 dan angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, walau melalui teleconference keterangan saksi itu tetap sah menurut hukum dengan menunjuk pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu “Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.”⁶⁶

Dengan demikian, berdasarkan pembahasan diatas, memberikan gambaran bahwa keterangan saksi dalam KUHAP yang telah diatur dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP. Pasal tersebut pada intinya menyatakan bahwa keterangan saksi merupakan sebuah alat bukti dalam perkara pidana yang

⁶⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 7.

⁶⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 44.

⁶⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 5 Ayat (1).

berupa keterangan yang diberikan langsung oleh saksi, mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Saksi tersebut dalam memberikan keterangannya wajib untuk hadir dalam persidangan yang dibuka untuk umum, sebagaimana sesuai dengan penjelasan dalam Pasal 160 KUHAP.⁶⁷

2. Keterangan Ahli

Keterangan ahli menurut pasal 1 angka 28 KUHAP adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.⁶⁸ Keterangan ahli memang terkait dengan alat bukti untuk membentuk keyakinan hakim dalam memutus suatu perkara *cybercrime*, biasanya di ambil dari seorang guru besar dan seorang pemikir.⁶⁹ Didalam Pasal 186 KUHAP menyatakan bahwa “keterangan seorang ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan”.⁷⁰ Menurut penjelasan Pasal 186 KUHAP dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan.

Dalam perkara *cyber crime* seorang ahli di tuntutan untuk memberikan pengertian tentang pengungkapan kejadian perkara yang terjadi di dunia maya sepanjang pengetahuan nya, karena saksi ahli merupakan orang yang berkompeten di bidangnya, hal ini dijelaskan pada Pasal 1 Ayat (1) Undang-

⁶⁷ Cahyo Handoko, *Kedudukan Alat Bukti Cyber crime Dalam Pembuktian Cyber Crime Di Pengadilan*, Jurisprudence, Volume 6 No.1, Maret 2016, hal. 4-5.

⁶⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 1 Angka 28.

⁶⁹ Samardi, *Keterangan Ahli*, <https://samardi.wordpress.com>, diakses pada 9 Oktober 2019.

⁷⁰ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 186.

Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi “Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik, telegram, teleks, telecopy, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”.⁷¹ Istilah “dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya” merupakan tuntutan kepada saksi ahli untuk menerjemahkan kejadian yang diungkapkan oleh saksi dan terdakwa, dan keterangan ahli berbentuk laporan yang dicatat dalam berita acara pemeriksaan.⁷²

3. Surat

Menurut Pasal 187 KUHAP, Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, jenis surat yang dimaksud adalah:

- a) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalam tata

⁷¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 Ayat (1).

⁷² Samardi, *Op.cit.*

laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.

- c) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya;
- d) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.⁷³

Jadi alat bukti surat yang dipakai dalam pembuktian *cyber crime* merupakan alat bukti yang sah sepanjang itu sesuai dengan sistem elektronik yang di atur dalam undang-undang yang mengaturnya, karena alat bukti surat terlebih yang berbentuk digital dapat dirubah keasliannya dalam hitungan detik dan tanpa harus memegang barang bukti yang ditunjukkan di persidangan. Dengan demikian dapat diketahui bahwa surat merupakan alat bukti yang sah sesuai dengan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta merujuk pada pertimbangan hakim yang bersangkutan.

4. Petunjuk

Alat bukti petunjuk merupakan otoritas penuh dan subjektivitas hakim yang memeriksa perkara tersebut. Hakim dalam mengambil kesimpulan tentang pembuktian sebagai suatu petunjuk haruslah menghubungkan alat bukti yang satu dengan yang lain. Penilaian atas kekuatan pembuktian suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu

⁷³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 187.

dilakukan oleh hakim setelah ia mengadakan pemeriksaan. Tegasnya, syarat-syarat petunjuk sebagai alat bukti harus mempunyai perseuaian satu sama lain atas perbuatan yang terjadi. Selain itu, keadaan-keadaan tersebut berhubungan satu sama lain dengan kejahatan yang terjadi dan berdasarkan pengamatan hakim yang diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.⁷⁴ Pasal 188 KUHAP ayat (1) yang berbunyi “Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”.⁷⁵

5. Keterangan Terdakwa

Penerapan pembuktian perkara pidana yang diatur dalam hukum acara pidana selamanya tetap diperlukan sekalipun terdakwa mengakui tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Terdakwa adalah seseorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan.⁷⁶ Menurut Pasal 189 ayat (1) KUHAP, “Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri”.⁷⁷ Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri, hal ini menunjuk

⁷⁴ Eddy O.S. Hiariej, *Op.cit*, hal. 110.

⁷⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 188.

⁷⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 1 Butir 15.

⁷⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 189 Ayat (1).

pada Pasal 189 ayat (4) KUHP “Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya”.⁷⁸ Bahwa seorang terdakwa tidak dibebani kewajiban dalam pembuktian, jadi keterangan terdakwa yang sah adalah keterangan ia nyatakan di sidang pengadilan.⁷⁹

Berkaitan dengan pemenuhan ketentuan minimal dua alat bukti, hukum positif tidak memberikan ketentuan bahwa salah satu alat bukti yang dipergunakan dalam persidangan harus merupakan keterangan saksi. Sepanjang hakim telah memperoleh keyakinan bahwa benar terjadi suatu tindak pidana dan terdakwa yang benar melakukannya disertai dengan minimal dua alat bukti, sebagai mana terdapat alat-alat bukti lain yang disebutkan dalam pasal 184 ayat (1) KUHP selain keterangan saksi. Kendati Pasal 185 ayat (2) KUHP *jo.* Pasal 185 ayat (3) KUHP menyatakan “Keterangan seorang saksi saja tidak dapat dianggap cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya,”⁸⁰

Dalam penjabaran ayat tersebut juga disertai dengan ketentuan bahwa hal itu tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti lain yang dianggap sah, dapat kita pahami bahwa keterangan satu orang saksi apabila dalam prosesnya disertai dengan suatu alat bukti lain yang sah dapat dianggap cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan, ketentuan tersebut tidak semata-mata dapat diartikan setidak-

⁷⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 189 Ayat (4).

⁷⁹ Yahya Harahap, *Kekuatan Pengakuan Terdakwa Dipersidangan*, www.HukumOnline.com, diakses pada 9 Oktober 2019.

⁸⁰ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 185 Ayat (2) *jo.* Pasal 185 Ayat (3).

tidaknya harus ada satu orang saksi untuk memenuhi minimal dua alat bukti dalam Pasal 183 KUHP, Karena Pasal 185 di atas merupakan penegasan minimal dua alat bukti, yang mana juga terdapat dalam ketentuan mengenai Keterangan terdakwa dalam Pasal 189 ayat (4) KUHP yang menyatakan “Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain”.⁸¹

Hal ini sejalan dengan prakteknya bahwa apabila diketahui dalam suatu tindak pidana *cybercrime* pada pembuktian dipengadilan tidak ditemui adanya saksi yang dapat memberikan keterangan guna membantu hakim dalam memperoleh keyakinan guna memutus perkara maka keterangan terdakwa dapat berpengaruh bersa terhadap keyakinan hakim, oleh karena itu sejalan dengan pendapat sebelumnya, Hakim dapat menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tanpa alat bukti keterangan Saksi, tetapi harus memenuhi minimal dua alat bukti lainnya dan dengan keyakinan Hakim.

Alat Bukti Keterangan Saksi dalam Pemeriksaan pada Acara Pidana dalam hal ini *Cyber crime*. Pada umumnya keterangan saksi merupakan alat bukti yang utama, boleh dikatakan tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi.⁸² Ketiadaan alat bukti keterangan saksi dalam pembuktian tindak pidana *Cyber crime* di pengadilan diketahui banyak memunculkan cela hukum terhadap putusan, dalam hal ini berkemungkinan lolosnya terdakwa dari segala yng disangkakan sehingga dapat menjadi

⁸¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 189 Ayat (4).

⁸² M. Yahya Harahap, *Pembahasan dan Permasalahan Penerapan KUHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 286.

kendala dalam penanganan tindak pidana *Cyber crime*, Didalam hokum acara pidana (KUHP) dalam pembuktian suatu tindak pidana menggunakan pembuktian negative yang artinya hakim tidak diperbolehkan untuk menjatuhkan suatu pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti untuk dapat memperoleh keyakinan benar atau tidaknya suatu tindak pidana dan benar atau tidaknya dilakukan oleh terdakwa suatu tindak pidana tersebut.⁸³

Arti pembuktian apabila ditinjau dari segi hukum acara pidana, antara lain ialah ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik hakim, penuntut umum, terdakwa, atau penasehat hukum, semua terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang. Maka dapat dikatakan bahwa *Cyber crime* dalam hal ini kedudukan terkait Alat bukti khususnya Keterangan saksi mengikuti apa yang telah diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

B. Urgensi Alat Bukti Saksi Dalam Pembuktian *Cybercrime* Di Persidangan Berdasarkan Perpektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Elektronik Dan Transaksi Elektronik

Dalam teori pembuktian hukum acara pidana menganut sebuah asas tentang saksi, yakni asas *Unus Testis Nullus Testis*. Secara harfiah *Unus Testis Nullus Testis* berarti seorang saksi bukanlah saksi. Tegasnya untuk membuktikan suatu peristiwa hukum, baik dalam konteks pidana maupun

⁸³ *Ibid.*

perdata, dibutuhkan minimal dua orang saksi. Asas tersebut mensyaratkan minimal terdapat dua orang saksi untuk proses pembuktian dalam peristiwa hukum. Demi tercapainya sebuah keadilan, aparat penegak hukum harus melakukan sebuah penerobosan terhadap asas ini apabila menangani sebuah perkara yang hanya terdapat satu saksi. Salah satu contoh tindak pidana yang hanya terdapat satu saksi atau hanya saksi korban, yakni tindak pidana perkosaan

Pembuktian merupakan tahap yang menentukan dalam proses penyelesaian perkara juga merupakan titik sentral hukum acara pidana masalah pembuktian merupakan pokok bahasan dan tinjauan semua pihak dan pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, terutama bagi hakim. Proses pembuktian pada hakikatnya memang lebih dominan pada sidang di pengadilan guna menemukan kebenaran materil akan peristiwa yang terjadi dan memberikan putusan seadil mungkin. Hal ini dikarenakan apa yang didapat ataupun dikemukakan dalam tahap pembuktian di persidangan inilah dapat diketahui benar atau tidaknya suatu dakwaan atau tuntutan tersebut dengan merujuk pada alat bukti.

Teori pembuktian berdasarkan Undang-undang secara positif (*Positif wettwijks theorie*) dalam teori ini undang-undang mengatur terkait dengan alat bukti yang dapat digunakan oleh hakim sekaligus mengenai cara bagaimana hakim dapat mempergunakannya. Menurut Andy Sofyan yang mengutip pendapat Simons, sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif (*positif wettelijke bewijs theorie*), untuk menyingkirkan semua

pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan pembuktian yang keras.⁸⁴ Dalam artian hakim tidak diberikan celah dalam menggunakan keyakinannya guna memutus perkara meskipun dalam tahap persidangan hakim tidak masih terdapat ketidakyakinan dalam perkara tersebut tetaplah harus memutuskan perkara tersebut berdasarkan alat-alat bukti yang telah di hadirkan ataupun di buktikan pada tahap persidangan.

Alat bukti sendiri dapat diartikan dengan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai pembuktian dianggap sah menurut Undang-undang.⁸⁵ Berfokus pada alat bukti saksi pada umumnya alat bukti dalam hal ini keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana, pengertian keterangan saksi sebagaimana yang diatur di dalam pasal 1 butir 27 KUHAP yakni “Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuan itu”.⁸⁶

Secara umum kita ketahui bahwa setiap proses perkara pidana selalu disertai alat bukti saksi dalam tahapan pembuktian dipersidangan, hampir disetiap perkara pidana, selalu bersandar pada pemeriksaan saksi sekurang-kurangnya, keterangan seorang saksi bukan saksi, bahwa pada prinsipnya KUHAP mensyaratkan lebih dari seorang saksi, akan tetapi prinsip ini dapat

⁸⁴ Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana : Suatu Pengantar*, Rangkap Education, Yogyakarta, 2013, hal. 242.

⁸⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Jilid II*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1985, hal. 145.

⁸⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 1 Butir 27.

disimpangi apabila keterangan seorang saksi tersebut didukung oleh alat bukti yang lainnya, disamping pembuktian dengan alat-alat bukti lainnya guna membantu hakim mendapatkan keyakinan untuk memutus suatu perkara. Maka dari itu Urgensi terhadap keadaan Alat bukti keterangan saksi pada pembuktian *Cyber crime* sangatlah besar pengaruhnya antara lain agar :

1. Keadaan suatu alat bukti keterangan saksi dalam pembuktian *Cyber crime* di pengadilan dapat berpengaruh besar terhadap pencapaian keyakinan hakim guna memutus perkara, apalagi diketahui bahwa tindak pidana ini besar kemungkinan selalu dilakukan secara individu yang memungkinkan tidak adanya saksi yang melihat, mendengar, maupun mengalami secara langsung bahwa benar seorang terdakwa yang diyakinkan benar melakukan tindak pidana tersebut, memang benar bahwa Keterangan seorang saksi saja belum bisa dianggap cukup untuk mendapatkan keyakinan hakim dalam memutus perkara, hal ini berdasarkan pada prinsip minimum pembuktian yang telah diatur dalam pasal 183 KUHP, dimana guna keterangan saksi dapat dianggap cukup maka setidaknya-tidaknya memenuhi minimal 2 alat bukti. Adapun seorang hakim dalam mempertimbangkan keterangan seorang saksi harus memperhatikan :
 - a) Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
 - b) Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
 - c) Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu

d) Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya”.⁸⁷

Akan tetapi meskipun tidak ada suatu ketentuan bahwa Alat bukti keterangan saksi adalah sesuatu yang harus ada dalam penyelesaian perkara di persidangan, Majelis Hakim akan mengusahakan sebisa mungkin terdapat keterangan saksi untuk memutus suatu perkara karena tanpa adanya saksi, dapat menimbulkan keragu-raguan Hakim dalam menjatuhkan putusan. Hakim tidak boleh memiliki keraguan yang masuk akal dalam menjatuhkan hukuman bersalah kepada terdakwa (*beyond a reasonable doubt*).

2. Terdapat beberapa hal yang menjadi faktor kerap digunakannya keterangan saksi dalam pembuktian perkara pidana. Pertama, terdapat perluasan makna keterangan saksi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 (Baca: MK ‘Rombak’ Definisi Saksi dalam KUHAP). Sehingga saat ini siapa saja yang masih memiliki relevansi dengan perkara untuk memberikan keterangan, dapat dijadikan sebagai saksi. Sejatinya dalam perkara tindak pidana *Cyber crime* pada proses pembuktian alat bukti dipersidangan tidak jauh berbeda dengan proses pembuktian tindak pidana umum, hanya saja Alat-alat bukti yang digunakan dalam pembuktian tindak pidana *Cybercrime* sedikit berbeda yakni salah satunya adalah penggunaan alat bukti digital sebagai pengganti ataupun tambahan terkait dengan alat bukti surat.

⁸⁷ *Op.cit*, hal. 146.

Urgensi yang selanjutnya terkait dengan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana ini karena tindak pidana *Cyber crime* seperti yang kita ketahui ruang lingkup jangkauan dan dampaknya dapat dirasakan cukup luas. Secara konseptual perlindungan korban merupakan suatu upaya melindungi orang/badan hukum, yang telah mendapatkan kerugian baik kerugian fisik, mental emosional, kehilangan harta benda atau perusakan terhadap hak-hak mereka melalui tindakan ataupun pembiaran yang telah diatur dalam hukum pidana akibat suatu perbuatan jahat yang tidak dapat dibiarkan berlangsung ditengah-tengah masyarakat.⁸⁸ Seperti pada salah satu tindak pidana yang terjadi di Surakarta, dimana terdakwa diputus bebas dari semua dakwaan terkait tindak pidana (*Cyber crime*) pembobolan Email suatu perusahaan yang mengakibatkan kerugian hingga milyaran rupiah terhadap korban, dikarenakan tidak adanya Alat bukti saksi yang dapat dihadirkan didalam persidangan tahap pembuktian guna memberikan keterangan agar dapat membantu hakim dalam mencapai keyakinan terhadap putusan maka terdakwa diputus bebas.

Dalam hal ini kepentingan adanya saksi juga berkaitan sebagai perlindungan hukum terhadap korban antara lain enanggungan kejahatan tindak pidana internet dapat dilakukan dengan berbagai upaya diantaranya penanggungan secara preemtif, preventif dan represif. Upaya preemtif dilakukan dengan meratifikasi konvensi-konvensi *cyber crime* internasional kedalam sistem perundang-undangan Indonesia. Konvensi Dewan Eropa merupakan salah satu bentuk konvensi internasional yang sudah diratifikasi

⁸⁸ Thantawi, Dahlan Ali dan Suhaimi, *Perlindungan Korban Tindak Pidana Cyber crime Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 No. 1, Februari 2014.

sebagian isi kovenannya kedalam sistem perundang-undangan Indonesia Penanggulangan *cyber crime* secara preventif dapat dilakukan dengan meningkatkan pengamanan, meningkatkan daya guna perangkat komputer, keahlian serta kedisiplinan dalam menggunakan perangkat saat berselancar di dunia maya. Kegiatan tersebut dapat berupa tindakantindakan yang bisa dilakukan baik secara perorangan (pribadi), kebijakan nasional maupun global. Sedangkan Penanggulangan *cyber crime* secara represif dilakukan dengan menangkap para pelaku tindak pidana untuk diproses sesuai dengan hukum yang berorientasi kepentingan korban melalui pemberian restitusi, kompensasi maupun asistensi yang menjadi tanggung jawab pelaku dengan Negara sebagai fasilitatornya.

Maka dalam hal ini kepentingan terhadap adanya alat bukti saksi dalam pembuktian *Cyber crime* termasuk hal yang bisa dikatakan hal yang utama, selain berkaitan dengan membantu hakim mencapai keyakinan dalam memutus suatu perkara juga sebagai upaya perlindungan hukum secara *represif* terhadap korban tindak pidana *Cyber crime*.

Hingga saat ini dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana *Cybercrime* masih tetap merujuk pada KUHAP (kitab undang-undang hokum acara pidana) yang dimana dalam penyelesaian perkara *Cybercrime* harus dalam sistem pembuktian yang dianut dalam Pasal 183 KUHAP,⁸⁹ dijelaskan “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan

⁸⁹ Waluyadi, *Op.cit.*

bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa lah yang bersalah melakukannya”.⁹⁰

Berdasarkan hal tersebut dapat kita ketahui bahwa secara umum alat bukti keterangan saksi dapat dikatakan sebagai alat bukti utama dalam pembuktian suatu tindak pidana termasuk juga dalam perkara *Cybercrime* apalagi dalam perkara tersebut diketahui termasuk dalam tindak kejahatan yang dilakukan secara diam-diam (*silent*) dan ruang lingkup tindak pidana tersebut sangatlah luas karena dengan perkembangan teknologi juga berdampak negative dengan hilangnya Batasan-batasan jarak dan juga termasuk dalam hal berkomunikasi maupun berniaga hal inilah yang harus di perhatikan secara serius terkait penindakan terhadap para pelaku kejahatan *Cybercrime*.

Pembuktian tindak pidana *Cybercrime* dipengadilan merujuk pada pembuktian dengan system yang telah diatur didalam KUHAP dimana keterangan saksi sebagai alat bukti yang utama guna membantu hakim dalam memperoleh keyakinan untuk memutuskan perkara, meskipun tidak dapat dianggap sah jika hanya dengan keterangan saksi atau hanya dengan alat bukti saksi, haruslah di sertai dengan pembuktian alat bukti yang lainya.

Akan tetapi jika ditelaah lebih jauh apabila dalam pembuktian suatu tindak pidana tidak adanya alat bukti berupa keterangan saksi dikarenakan system pembuktian yang digunakan atau yang dianut pada saat ini adalah system pembuktian secara positif.⁹¹ Dapat menimbulkan cela bagi pelaku untuk

⁹⁰ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 183.

⁹¹ Ronal, *Tinjauan Yuridis Terhadap Cybercrime*, Jurnal Skripsi, Volume 4 No. 6, 2016, hal. 4.

lolos dari jeratan hukum maupun juga kesewenang-wenangan jika penilaian kesalahan terdakwa hanya ditentukan oleh keyakinan hakim.

C. Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Saksi Dalam Tindak Pidana *Cybercrime*

Dalam sistem peradilan di Indonesia, keberadaan alat bukti merupakan sesuatu yang sangat menentukan putusan hukum yang diambil oleh hakim. Bukan merupakan rahasia umum bahwa dalam proses persidangan sebelum hakim menjatuhkan atau memutus suatu perkara akan didahului dengan tahap pemeriksaan alat-alat bukti berupa keterangan saksi dan lain sebagainya yang dianggap dapat membantu jalannya proses peradilan sekaligus membantu hakim dalam menemukan keyakinan guna memutus suatu perkara.⁹²

Mengenai Alat bukti yang dianggap sah menurut undang-undang, diatur dalam Pasal 184 KUHP yaitu Keterangan saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan Terdakwa.⁹³ Juga terkait dengan tindak pidana *Cyber crime* yakni alat bukti digital sebagai perluasan terhadap alat bukti surat. Dalam penyelesaian perkara pidana, seseorang dianggap bersalah apabila sudah ada putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Kekuatan alat bukti inilah yang mendukung putusan hakim di pengadilan dalam memutuskan perkara. Kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk didasari pengamatan hakim untuk menilai persesuaian antara fakta-fakta yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang didakwakan.⁹⁴ Jadi alat bukti dapat didefinisikan sebagai

⁹² I. Rusyadi, *Kekuatan Alat Bukti Dalam Persidangan Perkara Pidana*, Jurnal Hukum PRIORIS, Volume 5 No. 2, Tahun 2016, hal. 130.

⁹³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 184.

⁹⁴ Eddy O.S. Hiarij, *Op.cit*, hal. 52.

segala hal yang dapat digunakan untuk membuktikan perihal kebenaran suatu peristiwa dalam persidangan.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 173 KUHAP bahwa Hakim ketua sidang dapat mendengar keterangan saksi mengenai hal tertentu tanpa hadirnya terdakwa, untuk itu ia minta terdakwa keluar dari ruang sidang akan tetapi sesudah itu pemeriksaan perkara tidak boleh diteruskan sebelum terdakwa diberitahukan semua hal pada waktu ia tidak hadir,⁹⁵ (*Nullum delictum nulla poena praevia lege poenali*) yang berarti tidak ada perbuatan pidana atau tidak ada pidana tanpa undang-undang pidana sebelumnya. Ada empat makna asas legalitas :

1. Terhadap ketentuan pidana, tidak boleh berlaku surut (*nonretroaktif atau nullum crimen nulla poena sine lege praevia atau lex praevia*).
2. Ketentuan pidana harus tertulis dan tidak boleh dipidana berdasarkan hukum kebiasaan (*nullum crimen nulla poena sine lege scripta atau lex scripta*).
3. Rumusan ketentuan pidana harus jelas (*nullum crimen nulla poena sine lege certa atau lex certa*).
4. Ketentuan pidana harus ditafsirkan secara ketat dan larangan analogi (*nullum crimen nulla poena sine lege stricta atau lex stricta*).⁹⁶

Kekuatan alat bukti, hakim mempunyai keyakinan atas kebenaran alat bukti yang ada. Maksudnya alat bukti yang ada berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, maupun keterangan terdakwa harus diyakini hakim berkaitan dengan peristiwa atau kejahatan yang sudah terjadi atau

⁹⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 173.

⁹⁶ I. Rusyadi, *Op.cit*, hal. 132.

berkas-berkas perkara yang ada. Dengan kata lain harus sesuai dengan fakta bukan rekayasa. Oleh karena itu, kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk harus didasari pengamatan hakim untuk menilai persesuaian antara fakta-fakta yang ada dengan tindak pidana yang didakwakan dan juga persesuaian antara alat-alat bukti, artinya dapat disimpulkan bahwa sekurang-kurangnya harus ada dua petunjuk untuk mendapat bukti yang sah.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, seorang saksi dapat menggunakan media elektronik untuk memberikan keterangannya, sehingga tidak harus datang langsung ke pengadilan sehingga bisa melalui media komunikasi berdasarkan pada Pasal 44 menyebutkan “Alat bukti penyidikan penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan menurut ketentuan undang-undang ini adalah sebagai berikut : a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan, dan b. alat bukti berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).⁹⁷

Sebagai alat bukti, tidak semua keterangan saksi dapat dinilai sebagai alat bukti dalam suatu persidangan, terdapat syarat-syarat tertentu agar keterangan saksi dapat dinilai sebagai alat bukti didalam persidangan untuk membuat ketarangan dalam suatu perkara. Adapun syarat-syarat tersebut yakni sebagai berikut:⁹⁸

⁹⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 44.

⁹⁸ Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia)*, Setara Press, Malang, 2014. Hal. 175.

1. dinyatakan didalam sidang pengadilan secara langsung
2. keterangan tersebut diberikan dibawah sumpah
3. keterangan seorang saksi bukan saksi, bahwa pada prinsipnya KUHAP mensyaratkan lebih dari seorang saksi, akan tetapi prinsip ini dapat disimpangi apabila keterangan seorang saksi tersebut didukung oleh alat bukti yang lainnya
4. Dalam hal keterangan saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat dinilai sebagai alat bukti apabila keterangan para saksi tersebut saling terkait dan berhubungan satu dengan lainnya
5. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi lainnya.
6. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lainnya.
7. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi atau tidaknya keterangan itu dipercaya patut dipertimbangkan oleh hakim dalam menilai keterangan saksi.

Saksi menurut sifatnya dalam sidang pembuktian dapat dibagi menjadi dua golongan , yaitu sebagai berikut:

1. Saksi a charge (saksi yang memberatkan terdakwa)

Saksi ini adalah saksi yang telah dipilih dan diajukan oleh penuntut umum, dengan keterangan atau kesaksian yang diberikan akan memberatkan terdakwa, sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 160 Ayat (1) Huruf C Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

2. Saksi a de charge (saksi yang meringankan atau mengutungkan terdakwa)

Saksi ini dipilih atau diajukan oleh penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukum, yang mana keterangan atau kesaksian yang diberikan akan meringankan atau mengutungkan terdakwa, sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 160 Ayat (1) Huruf C Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.⁹⁹

Bahwa dapat diketahui berdasarkan penjabaran Alat bukti saksi dalam hal ini keterangan saksi dapat dikatakan berpengaruh besar dalam penyelesaian perkara dikarenakan dapat kita ketahui bahwa dalam persidangan perkara pidana khususnya adanya alat bukti saksi sangat membantu hakim dalam memperoleh keyakinan untuk memutus suatu perkara meskipun harus juga diikuti dengan pembuktian terhadap alat bukti lain yang di setujui dan di buktikan didalam persidangan, tidak terkecuali terhadap tindak pidana *Cybercrime* yang dimana tindak pidana ini dalam system peradilanya mengacu pada apa yang telah diatur didalam KUHAP yang berarti peranan alat bukti berpengaruh penuh terhadap putusan.

Sering kali dalam perkara *Cybercrime* ketidak adanya alat bukti saksi dalam hal ini keterangan saksi membuat hambatan dalam proses peradilan dimana faktor tersebut memunculkan cela bagi terdakwa untuk dapat lolos dari jeratan hukum sekaligus kesulitan bagi hakim untuk mendapat keyakinan bahwa seorang terdakwa dinyatakan bersalah ataupun bebas, dan hakim tetap harus memutus perkara tersebut.

⁹⁹ Andi Sofyan, *Op.cit*, hal. 254-255.

Dari beberapa kasus seperti yang telah di contohkan yang terjadi di kota Surakarta bahwasanya terdakwa putusan bebas dikarenakan tidak adanya alat bukti saksi yang pada akhirnya jaksa harus menghadirkan seorang ahli guna memberikan penjelasan terkait apa yang dimaksudkan pada persidangan tersebut, Pasal 186 KUHAP menyatakan bahwa keterangan seorang ahli keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Jadi, pasal tersebut tidak menjawab siapa yang disebut ahli dan apa itu keterangan ahli.

Pada penjelasan pasal tersebut juga tidak menjelaskan hal ini. Dikatakan sebagai berikut Keterangan seorang ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum maka pasca pemeriksaan di sidang diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim.

Keterangan ahli berbeda dengan keterangan saksi, tetapi sulit pula dibedakan dengan tegas. Kadang-kadang seorang ahli merangkap pula sebagai saksi. KUHAP menentukan bahwa saksi wajib mengucapkan sumpah,¹⁰⁰ tanpa menyebutkan ahli. Tetapi pada Pasal 161 ayat (1) dikatakan: "Dalam hal saksi

¹⁰⁰ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 160 Ayat (3)

atau ahli tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji".¹⁰¹ Di sinilah dapat dilihat bahwa ahli yang dimintai keterangannya tersebut harus mengucapkan sumpah atau janji.¹⁰² Pada penjelasan ayat (2) pasal tersebut dikatakan: "Keterangan saksi alau ahli yang tidak disumpah atau mengucapkan janji, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah. tetapi hanyalah merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim".¹⁰³

Bahwasanya diketahui keterangan ahli tidak diperbolehkan merunding kepada salah satu sisi, tugas seorang ahli yang dihadirkan dalam persidangan hanya guna menerangkan khusus terkait hal yang diperlukan guna membuat terang suatu tindak pidana maka dari itu dalam tindak pidana *Cyber crime* ketidak adaanya alat bukti saksi berupa keterangan saksi ini dapat berakibat fatal karena menimbulkan cela hukum karena Hampir semua perkara pidana selalu bersandar pada pemeriksaan saksi, sekurang-kurangnya disamping dengan alat bukti lain masih diperlukan pembuktian dengan alat bukti berupa keterangan saksi, maka dari itu untuk menjadi seorang saksi harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil maka dapat diketahui kekuatan alat bukti saksi dalam proses penyelesaian tindak pidana dipengadilan berpengaruh besar terhadap hasil putusan.

¹⁰¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 161 Ayat (1).

¹⁰² Andi Hamzah, *Op.cit*, hal. 282.

¹⁰³ Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 161 Ayat (2).